

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Kondisi Umum Desa Limpung

##### 2.1.1 Profil Wiayah Desa Limpung

Desa Limpung terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Limpung berada pada koordinat yang strategis dengan aksesibilitas yang baik menuju pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan. Desa Limpung memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sempu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Donorjo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kepuh, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Babadan. Selain itu Desa Limpung memiliki luas wilayah sekitar 113,69 hektar, yang terdiri dari 55,50 hektar tanah sawah dan 58,15 hektar tanah bukan sawah berdasarkan data terakhir (Laporan Desa 2024).

Desa Limpung terdiri dari empat dusun yang terbagi kedalam 4 RW dan 13 RT, diantaranya terdiri dari, Dusun Karanganyar, Dusun Limpung, Dusun Gepor, dan Dusun Sikebo. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 2.1** Jumlah Penduduk Desa Limpung Tahun 2025

| No.                 | No. RW | Laki-laki    | Perempuan    | Jumlah       |
|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1.                  | 001    | 365          | 368          | 733          |
| 2.                  | 002    | 662          | 724          | 1.386        |
| 3.                  | 003    | 660          | 649          | 1.309        |
| 4.                  | 004    | 341          | 341          | 682          |
| <b>Jumlah Total</b> |        | <b>2.028</b> | <b>2.082</b> | <b>4.110</b> |

*Sumber: Data dari Desa/Kelurahan Limpung, 2025*

Dengan jumlah penduduk mencapai 4.110 jiwa, dari total jumlah penduduk Desa Limpung yang terdiri dari 2.028 laki-laki, dan 2.082 perempuan. Sehingga desa ini menjadikan desa dengan penduduk terpadat dibandingkan desa-desa di sekitarnya.

**Tabel 2.2** Data Jumlah Penduduk Desa Limpung Berdasarkan Pekerjaan  
Tahun 2025

| No.           | Pekerjaan             | Laki-laki    | Perempuan    | Jumlah       |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.            | Belum/Tidak bekerja   | 446          | 455          | 901          |
| 2.            | Mengurus Rumah Tangga | 1            | 396          | 397          |
| 3.            | Pelajar/Mahasiswa     | 404          | 333          | 737          |
| 4.            | Pensiun               | 17           | 10           | 27           |
| 5.            | PNS                   | 39           | 33           | 72           |
| 6.            | TNI                   | 5            |              | 5            |
| 7.            | Polisi                | 10           | 1            | 11           |
| 8.            | Pedagang              | 104          | 141          | 245          |
| 9.            | Petani                | 29           | 26           | 55           |
| 10.           | Industri              | 5            | 4            | 9            |
| 11.           | Supir                 | 2            |              | 2            |
| 12.           | Karyawan swasta       | 135          | 91           | 226          |
| 13.           | Karyawan BUMN         | 4            |              | 4            |
| 14.           | Karyawan BUMD         | 4            |              | 4            |
| 15.           | Karyawan Honorer      | 2            |              | 2            |
| 16.           | Buruh harian lepas    | 201          | 111          | 312          |
| 17.           | Pembantu rumah tangga |              | 1            | 1            |
| 18.           | Tukang jahit          | 7            | 3            | 10           |
| 19.           | Tukang batu           | 2            | 1            | 3            |
| 20.           | Penata rambut         | 5            |              | 5            |
| 21.           | Pendeta               | 2            | 2            | 4            |
| 22.           | Wakil Bupati          | 1            |              | 1            |
| 23.           | Desen                 | 1            |              | 1            |
| 24.           | Guru                  | 31           | 49           | 80           |
| 25.           | Dokter                | 2            | 4            | 6            |
| 26.           | Bidan                 | 5            | 5            | 10           |
| 27.           | Perawat               | 5            | 5            | 10           |
| 28.           | Apoteker              |              | 2            | 2            |
| 29.           | Nelayan               | 3            |              | 3            |
| 30.           | Supir                 | 28           |              | 28           |
| 31.           | Pedagang              | 69           | 132          | 201          |
| 32.           | Perangkat desa        | 6            |              | 6            |
| 33.           | Kepala desa           | 1            |              | 1            |
| 34.           | Wiraswasta            | 459          | 275          | 734          |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>2.028</b> | <b>2.082</b> | <b>4.110</b> |

*Sumber: Data dari Desa/Kelurahan Limpung, 2025*

Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya setiap dusun menunjukkan keberagaman yang menjadi kekuatan desa dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu mata pencaharian utama masyarakat Desa Limpung yang dapat dilihat dari tabel diatas adalah pertanian dan perdagangan, dengan sebagian kecil penduduk bekerja di sektor jasa. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam seperti lahan pertanian produktif dan sumber daya manusia yang mulai melek teknologi, yang menjadi modal penting dalam mendukung implementasi program *Smart Village*.

Desa Limpung juga memiliki modal sosial yang tinggi dalam pelaksanaan program berbasis komunitas. Dukungan dari kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan desa. Selain itu, Haniyuhana dan Widiyarta (2023) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan lokal, sehingga program *Smart Village* dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam aspek infrastruktur, Desa Limpung sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Jalan-jalan utama telah diaspal, pembuatan trotoar di sepanjang Jalan Limpung-Bawang, dan beberapa jalan desa telah mengalami perbaikan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas atau poliklinik, dan juga balai desa tersedia untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Akan tetapi masih terdapat tantangan dalam penyediaan akses internet yang merata di seluruh wilayah desa. Hal ini menjadi perhatian penting, terutama dalam mendukung implementasi program *Smart Village* yang berbasis teknologi.

Dari segi pemerintahan, Desa Limpung memiliki struktur organisasi yang cukup tertata. Kepala desa bersama perangkat desa lainnya berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan desa. Berbagai program pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi, di implementasikan dengan koordinasi yang baik. Akan tetapi terdapat kendala dalam hal pengelolaan data dan dokumentasi yang belum terintegrasi secara digital dan juga transparan.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi program *Smart Village* di desa ini.

#### 2.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Limpung

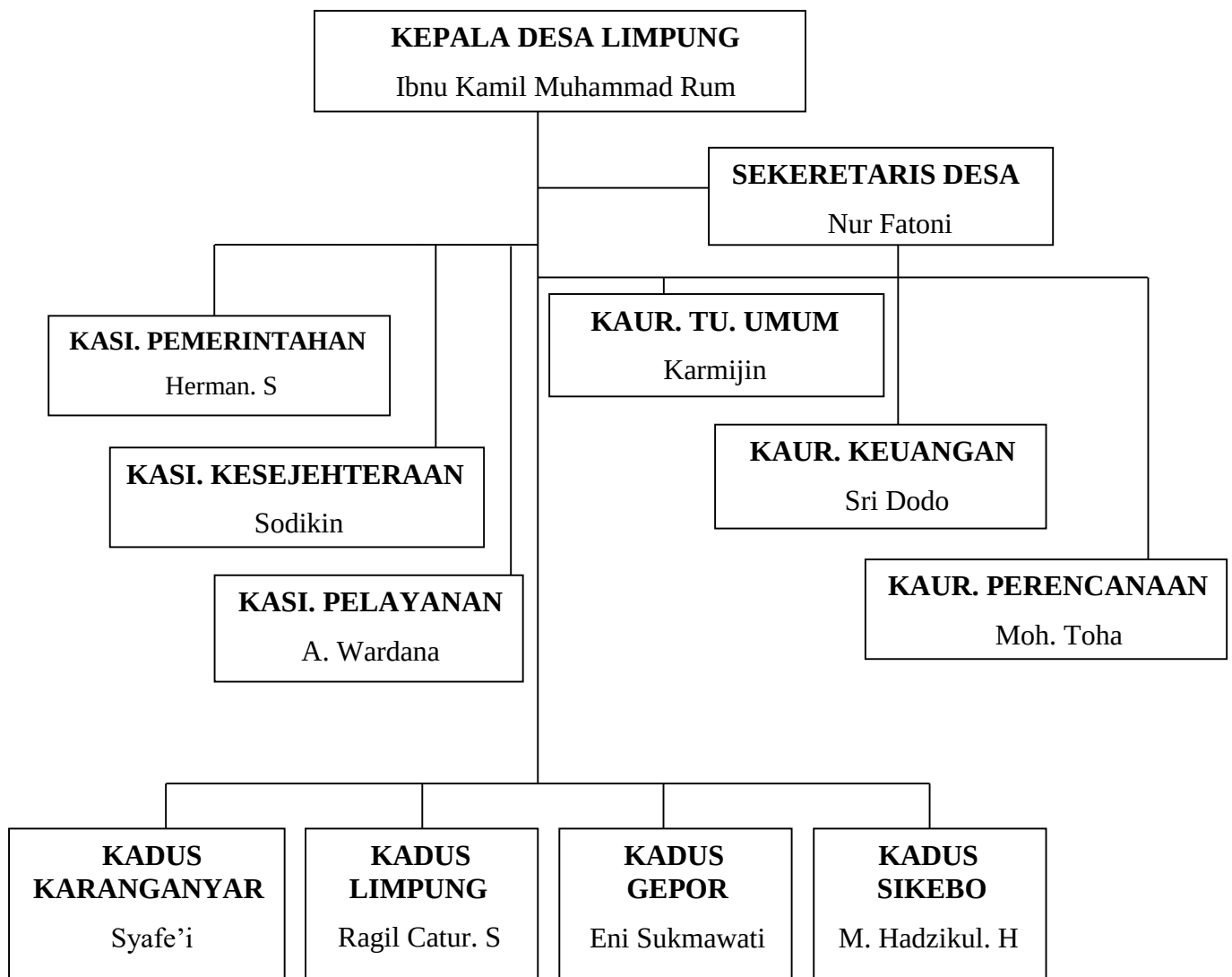
Pemerintah Desa Limpung merupakan lembaga pemerintahan tingkat desa yang memiliki peran setrategis dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Desa Limpung di pimpin oleh Kepala Desa Bapak Ibnu Kamil Muhammad Rum, yang bertugas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintah desa. Beliau bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola pemerintahan, dan juga memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang memiliki fungsi administrasi dan juga teknis masing-masing. Seperti jabatan Sekretaris Desa di isi oleh Bapak Muhamad Fatoni yang bertugas menyelenggarakan administrasi desa, dan membantu penyusunan perencanaan, serta mendukung pelaporan kegiatan pemerintah desa. Selain itu terdapat juga pejabat structural lainnya seperti Bapak Sri Dodo yang juga menduduki posisi Sekretraris atau bagian tata usaha dalam sturktur pendukung. Peran sekretaris sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kepala desa dan juga mengkoordinasikan kegiatan antar bagian di dalam pemerintah desa.

Pada lini pelaksana, struktur organisasi desa terdiri dari ebberapa kepala seksi (Kasi) yang mengurus urusan sektoral pemerintah. Kasi Pemerintahan di jabat oleh Bapak Hirman yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola aspek administrasi pemerintah dan juga kependudukan di tingkat desa. Selanjutnya posisi Kasi Pelayanan di pegang oleh Bapak Ali Wardana yang bertanggung jawab dalam urusan pelayanan publik seperti pengurusan surat menyurat, kegiatan sosial masyarakat, juga kegiatan pelayanan lainnya yang berkaitan langsung dengan warga. Kedua posisi ini sangat relevan dalam

mendukung pelaksanaan Program *Smart Village* yang menitikberatkan pada transformasi pelayanan yang sudah berbasis digital.

**Tabel 2.3** STRUKTUR ORGNISASI DAN TATA PEMERINTAHAN  
DESA LIMPUNG



*Sumber: Desa/Kelurahan Limpung, 2025*

Struktur birokrasi ini juga di dukung oleh sejumlah Kepala (Kau), dan juga Kepala Dusun (Kadus) yang dimana berperan di dalam urusan administrasi, keuangan, dan juga penghubung antar warga dengan oemerintah desa. Kepala Urusan biasanya menangani keuanagan, umum, dan juga perencanaan, sementara Kepala Dusun, menjadi ujung tombak pemerintah di tingkat tingkat wilayah mikro atau dusun. Dengan adanya perangkat ini menjadi penting dalam mendukung operasional kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam mendukung kelancaran penyebaran informasi dan juga pelaksanaan program teknologi desa.

Akan tetapi meskipun pemerintah Desa Limpung telah terbentuk secara lengkap, tetapi berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwasanya beberapa fungsi belum berjalan secara optimal, terutama dalam implementasi program berbasis digital. Dimana sebagian perangkat desa belum memahami secara menyeluruh tujuan dan mekanisme pelaksanaan dari Program *Smart Village*. Beberapa di antaranya bahkan belum memperoleh pelatihan atau juga pendampingan teknis mengenai teknologi informasi dan juga sitem pelayanan digital desa. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat birokrasi desa agar mampu beradaptasi dengan era digital.

Struktur pemerintah desa seharusnya dapat menjadi pondasi utama untuk mendukung keberhasilan setiap program yang akan di jalankan. Maka dari itu sangatlah penting untuk para pemerintah khususnya di Desa Limpung untuk melakukan pembenahan secara berkelembagaan. Evaluasi peran dan juga tugas-tugas pokok masing-masing perangkat perlu di lakukan secara berkala termasuk pelatihan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Dengan struktur pemerintah yang professional dan terorganisir, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman maka Program *Smart Village* dapat di implementasikan secara maksimal dan dapat menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa.

### 2.1.3 Aksesibilitas dan Layanan Publik di Desa Limpung

Aksesibilitas dan layanan publik merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Di Desa Limpung, sistem pelayanan publik masih didominasi oleh metode konvensional, di mana masyarakat secara langsung mendatangi kantor desa untuk mengurus keperluan administrasi seperti surat keterangan, surat pengantar, ataupun kebutuhan lainnya. Proses pelayanan ini umumnya dilakukan secara tatap muka dengan perangkat desa, tanpa adanya mekanisme digital atau sistem antrean yang terstruktur. Hal ini menyebabkan pelayanan berjalan secara tradisional dan cenderung memakan waktu, terlebih apabila jumlah pemohon layanan meningkat dalam satu waktu.

Dalam upaya menuju digitalisasi pelayanan publik, pemerintah desa telah mencoba memanfaatkan media komunikasi sederhana seperti aplikasi *WhatsApp* untuk menjangkau masyarakat. Tetapi dalam penggunaan aplikasi tersebut masih bersifat informal dan belum diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) desa. Beberapa warga mengaku hanya mengetahui adanya layanan tersebut dari perangkat desa secara pribadi, bukan melalui sosialisasi atau pengumuman resmi. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses, di mana hanya warga yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa saja yang terbiasa memanfaatkan layanan *WhatsApp* sebagai jalur komunikasi administratif. Sementara sebagian besar masyarakat tetap memilih datang langsung ke kantor desa karena merasa lebih mudah dan jelas dalam menyampaikan kebutuhan mereka.

Keberadaan *website* desa ([limpung.desa.id](http://limpung.desa.id)) juga belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media pelayanan. Situs ini hanya berisi informasi dasar mengenai profil desa, kegiatan desa, dan pengumuman umum, tanpa menyediakan fitur layanan daring seperti formulir permohonan surat atau pengajuan administrasi digital. Minimnya inovasi layanan publik ini menjadi salah satu indikator lemahnya penerapan program *Smart Village* di Desa Limpung. Padahal konsep *Smart Village* menekankan pada pentingnya

transformasi layanan publik menuju sistem yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain tantangan aksesibilitas juga muncul dari kualitas infrastruktur teknologi yang belum merata. Meski jaringan internet telah tersedia di beberapa titik, akan tetapi tidak seluruh wilayah desa dapat mengakses internet dengan baik. Beberapa daerah di pinggiran desa mengalami gangguan konektivitas atau bahkan tidak terjangkau jaringan. Kondisi ini turut menjadi kendala dalam pengembangan sistem pelayanan berbasis daring, baik dari sisi penyedia layanan pemerintah desa ataupun pengguna (masyarakat). Selain itu perangkat keras seperti komputer desa, sistem penyimpanan data, atau perangkat komunikasi juga belum tersedia secara memadai untuk mendukung pelayanan digital yang profesional.

Kendala lainnya juga terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat yang masih menjadi tantangan dalam proses transformasi pelayanan. Banyak warga desa khususnya yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah, mengaku kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi dalam mengakses layanan publik. Mereka merasa lebih nyaman berkomunikasi secara langsung daripada melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di desa tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur, tetapi juga perlu dibarengi dengan edukasi dan pelatihan digital yang menyentuh semua lapisan masyarakat secara inklusif.

Keterbatasan dalam sistem pelayanan dan aksesibilitas ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa. Masyarakat mengeluhkan proses pelayanan yang lambat, informasi yang kurang jelas, serta ketidakpastian waktu penyelesaian layanan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam alur pelayanan juga menimbulkan persepsi negatif dari warga terhadap profesionalitas perangkat desa. Tanpa adanya sistem pelayanan yang tertata dan berbasis teknologi, pelayanan publik di desa berisiko tidak memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.



Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Limpung perlu menyusun strategi penguatan pelayanan publik secara menyeluruh. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menyusun SOP pelayanan berbasis digital yang jelas dan terstandar. Kemudian desa juga dapat melakukan pelatihan teknologi informasi kepada perangkat desa dan masyarakat, sehingga seluruh pihak memiliki kesiapan dalam beradaptasi dengan sistem pelayanan modern. Di samping itu, kerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, universitas, atau lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi solusi pendampingan teknis dan penguatan kapasitas digital.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kondisi aksesibilitas dan pelayanan publik di Desa Limpung saat ini masih jauh dari ideal sebagai desa yang menerapkan konsep *Smart Village*. Transformasi layanan belum berjalan secara sistematis dan belum didukung dengan kebijakan internal yang memadai. Kendala utama yang dihadapi bukan hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia dan budaya pelayanan yang masih konvensional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis digital dan inklusif, dibutuhkan komitmen, sumber daya, serta kerja sama lintas sektor yang kuat di tingkat lokal.